



Peran *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang

Muhammad Ridwan¹, Dies Nurhayati²

^{1,2}Universitas PGRI Wiranegara

Email : mridwan.y17@gmail.com, dies.ananto@gmail.com

Sections Info	Abstract
Article history: Received: Januari, 02, 2025 Accepted: Mei, 17, 2025 Published online: Juni, 30, 2025 Keywords: International Monetary Fund (IMF), Economic Development, Developing Countries. Kata kunci: Internasional Monetary Fund (IMF), Pembangunan Ekonomi, Negara Berkembang.	<i>This article discusses the role of developing countries' economic development supported by the International Monetary Fund (IMF). In the era of globalization, developing countries face challenges such as financial market volatility and limited resources. The IMF, founded in 1944, plays a key role in providing loans, technical assistance, research, analysis, and surveillance to strengthen the economic policies of its member countries. This article uses a qualitative method by examining sources from various reference journals to understand the impact and criticism of the role of the IMF. The results show that while the IMF has helped developing countries overcome financial crises and boost economic growth, its policies and requirements are often seen as exacerbating the conditions of countries in crisis. Despite these criticisms, the IMF continues to play a role in creating global economic stability. This article also reviews the history of the IMF, its short- and long-term policies, and the impact of IMF assistance on several countries. In conclusion, the IMF needs to continue to adapt and innovate in order to support inclusive and sustainable economic growth.</i> Abstrak Artikel ini membahas peran pembangunan ekonomi negara berkembang yang di dukung <i>International Monetary Fund</i> (IMF). Di era globalisasi, negara- negara berkembang menghadapi tantangan seperti volatilitas pasar keuangan dan keterbatasan sumber daya. IMF, didirikan pada tahun 1944, berperan penting dalam menyediakan pinjaman, bantuan teknis, penelitian, analisis, dan surveilans untuk memperkuat kebijakan ekonomi negara anggotanya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji sumber dari berbagai jurnal referensi untuk memahami dampak dan kritik terhadap peran IMF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun IMF telah membantu negara-negara berkembang mengatasi krisis keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan dan persyaratannya seringkali dipandang memperburuk kondisi negara yang sedang krisis. Terlepas dari kritik tersebut, IMF terus berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi global. Artikel ini juga mengulas sejarah IMF, kebijakan jangka pendek dan jangka panjangnya, serta dampak bantuan IMF pada beberapa negara. Kesimpulannya, IMF perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama bagi negara berkembang dalam upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas fiskal yang rendah, dan ketergantungan pada pasar internasional.¹ Dalam situasi ini, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) memegang peran penting sebagai mitra strategis dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan ekonomi. IMF, yang didirikan pada tahun 1944, memiliki mandat untuk memastikan stabilitas sistem moneter global melalui berbagai layanan, seperti pinjaman, surveilans, dan bantuan teknis. Di era globalisasi, keberadaan IMF menjadi semakin relevan karena banyak negara berkembang yang terjebak dalam krisis keuangan, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyatnya. IMF sering menjadi solusi bagi negara-negara tersebut dengan menawarkan dukungan keuangan serta panduan kebijakan untuk memperkuat fundamental ekonomi.²

Meskipun demikian, keberadaan IMF tidak lepas dari kritik. Persyaratan ketat dalam program bantuan IMF sering kali dianggap memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang yang tidak memiliki daya tawar yang kuat. Sebagian kalangan juga memandang kebijakan IMF terlalu pro-pasar sehingga mengabaikan kebutuhan sosial masyarakat di negara penerima bantuan. Fenomena ini menciptakan dilema antara manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh intervensi IMF dalam pembangunan ekonomi.³

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran IMF dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang dengan mengkaji literatur yang relevan. Kajian ini berfokus pada analisis kebijakan IMF, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kritik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap kontribusi dan tantangan IMF di negara berkembang.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan kesimpulan yang lebih seimbang mengenai efektivitas peran IMF serta rekomendasi untuk meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis terhadap data sekunder dari jurnal, laporan resmi, dan artikel terkait menjadi landasan utama dalam penulisan artikel ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami serta mengoptimalkan peran IMF di masa mendatang

¹ Muhammad Amsal Sahban and M M Se, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*, vol. 1 (Sah Media, 2018).

² Faris Al-Fadhat and Jasmine Savitri, "Lembaga Keuangan Internasional Dan Persoalan Sustainable Development Goals," *Yogyakarta: Samudra Biru* (2023).

³ Intan Fitri Meutia, "Reformasi Administrasi Publik" (AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2017).

B. LANDASAN TEORI

International Monetary Fund (IMF) adalah lembaga internasional yang didirikan berdasarkan hasil Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 dengan tujuan utama menciptakan stabilitas sistem moneter internasional.⁴ Dalam kerangka teori ekonomi pembangunan, IMF memainkan peran penting sebagai fasilitator stabilisasi ekonomi global melalui tiga fungsi utamanya, yaitu pemberian pinjaman, pengawasan kebijakan ekonomi negara anggota (*surveillance*), dan penyediaan bantuan teknis. Fungsi ini berakar pada teori intervensi ekonomi yang menekankan pentingnya peran lembaga supranasional dalam membantu negara-negara mengatasi kegagalan pasar dan krisis ekonomi.

Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi, peran IMF sejalan dengan konsep modernisasi yang menekankan pentingnya transfer teknologi, keahlian, dan sumber daya dari negara maju ke negara berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan bahwa dengan dukungan finansial dan teknis, negara berkembang dapat memperbaiki infrastruktur ekonominya, memperkuat institusi domestik, dan meningkatkan daya saing di pasar global. IMF sering kali mengintegrasikan pendekatan ini melalui program pinjaman yang disertai dengan kebijakan penyesuaian struktural, seperti reformasi fiskal, deregulasi pasar, dan liberalisasi perdagangan.

Namun, dalam konteks teori ketergantungan (*dependency theory*), kebijakan IMF sering dikritik karena dianggap memperkuat ketergantungan negara berkembang pada negara maju dan lembaga internasional. Program penyesuaian struktural IMF, misalnya, sering dikritik karena memprioritaskan kepentingan ekonomi global dibandingkan kebutuhan lokal negara penerima bantuan. Teori ini juga menyoroti dampak negatif liberalisasi ekonomi yang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang.⁵

Lebih lanjut, teori institusionalisme juga relevan dalam memahami peran IMF, khususnya dalam mendukung penguatan institusi ekonomi negara berkembang. IMF tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan dan institusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, meskipun sering menghadapi tantangan implementasi akibat resistensi politik dan kapasitas domestik yang terbatas.⁶

Secara keseluruhan, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa peran IMF dalam pembangunan ekonomi negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai pendekatan teori pembangunan. Teori-teori tersebut memberikan kerangka kerja untuk memahami potensi manfaat sekaligus tantangan yang dihadapi IMF dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

⁴ Andika Amrija Saragih, "Bretton Woods System: Eksistensi Hegemon Amerika Serikat Dalam Tatanan Perekonomian Global Paska Perang Dunia," *Global and Policy Journal of International Relations* 4, no. 02 (2016).

⁵ Nandani Zahara Mahfuzah, Zulkifli Nasution, and Fauziah Lubis, "Implikasi Globalisasi Dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024).

⁶ Umar Harun, "Perspektif Politik Internasional Penerapan Strategi Bantuan Imf Terhadap Indonesia" (Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2022).

berkelanjutan. Perspektif ini menjadi dasar untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas kebijakan IMF dalam memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis peran *International Monetary Fund* (IMF) dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang. Data yang digunakan berupa sumber sekunder dari jurnal ilmiah, laporan resmi, artikel, dan dokumen relevan lainnya.⁷ Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis informasi yang tersedia terkait topik penelitian.⁸ Analisis dilakukan dengan meninjau berbagai perspektif teoretis dan empiris untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi dan tantangan yang dihadapi IMF dalam implementasi kebijakannya di negara berkembang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

International Monetary Fund (IMF)

Ketika Perang Dunia II berakhir, negara-negara sekali lagi ditanyai bagaimana perekonomian global dapat ditingkatkan selama Perang Bretton Woods mengenai kebijakan moneter dan dasar-dasar hukum ekonomi internasional. Pada pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk turut serta meningkatkan kinerja perekonomian dunia melalui langkah-langkah seperti pengurangan kontrak dan pengembalian nilai-nilai yang dapat menghentikan perdagangan dunia. Memberikan pinjaman konsumen untuk membantu hukum dan sistem keuangan negara asing. Negara-negara dengan masalah keuangan. Kesimpulan dari konferensi tersebut adalah bahwa DPR atau Parlemen dibentuk oleh para anggotanya dan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1947. Jadi Dana Moneter Internasional adalah lembaga warga dunia, sehingga keanggotaannya bisa sekitar. 189 negara (Pamungkas dkk., 2019).

IMF adalah organisasi moneter internasional yang bertindak sebagai salah satu organisasi ekonomi internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan modal internasional ke semua negara. Tujuan Dana Moneter Internasional adalah untuk menyesuaikan sistem moneter internasional, menjaga nilai tukar, meningkatkan daya beli dan mengelola krisis moneter. Dana Moneter Internasional bertujuan untuk mewakili perekonomian negara secara bersamaan.⁹ IMF memiliki pendekatan unik dalam menyelesaikan

⁷ Muhammad Hamdan Ali Masduqie and Sirajul Arifin, "Socio-Economic Construction: Inorganic Waste Valuation Through the Indonesian Waqf Board (BWI) on Cash Waqf Development," *KnE Social Sciences* 10, no. 14 (2025): 526–538.

⁸ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁹ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Syarifudin Syarifudin, and Ana Toni Roby Candra Yudha, "Green Economy of Waste Bank in the Perspective of Maqashid Sharia in Surabaya-Green Economy Melalui Bank Sampah dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)* 8, no. 5 (2021): 593–606.

permasalahan nasional.

IMF, sebuah organisasi multilateral, mengidentifikasi negara-negara yang masih mengalami masalah keuangan. Mencegah ketidakstabilan keuangan untuk melindungi perekonomian regional dan global. IMF adalah badan penasihat yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi suatu negara ketika perekonomiannya berada dalam kondisi buruk. IMF memastikan perekonomian negara-negara anggotanya tidak menyusut. Oleh karena itu, IMF memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan ekonominegara berkembang. Pembiayaan ini ditujukan kepada negara-negara berkembang. Ketika IMF berdiri, anggotanya berjumlah 189 orang, sehingga dengan bergabung dengan IMF, suatu negara secara sukarela menyerahkan sebagian kedaulatan nasionalnya kepada IMF.

IMF mempunyai pengaruh yang besar terhadap semua negara. IMF memberikan dukungan kepada anggotanya dengan instrumen dan suku bunga yang dapat ditawarkan oleh suatu negara. Fakta bahwa seruan IMF kepada anggotanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan ini dapat menimbulkan banyak masalah bagi negara-negara.¹⁰ Selain pinjaman, Dana Moneter Internasional memberikan bantuan berkualitas tinggi kepada negara-negara yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis sistem keuangan internasionalnegara anggota, mengetahui kepentingan perekonomian negara tersebut sehingga dapat mencapai kesejahteraan, dan mengetahui kehidupan perekonomian negara tersebut yang akan ditentukan. Seluruh negara anggota menjadi sasaran utama IMF.¹¹ IMF bertanggung jawab untuk menganalisis keadaan perekonomian negara guna membuat pedoman yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok kepentingan untuk menganalisis dan memperbaiki situasi perekonomian di negara tersebut. IMF memang tidak bisa menyelesaikan masalah ini, namun bisa memperlambat hubungan antar negara.

Sejarah Terbentuknya IMF

Internasional Monetary Fund (IMF) didirikan pada tahun 1944 setelah Konferensi PBB yang diadakan di Bretton Woods, AS. Saat itu, setidaknya ada 45 perwakilan negara yang menyepakati tingkat kerja sama ekonomi. Tujuan kerja sama ekonomi ini adalah untuk mencegah terjadinya depresi besar kedua seperti yang terjadi pada tahun 1930. Pada tahun yang sama, perekonomian banyak negara melemah.¹² Oleh karena itu, negara-negara tersebut mengambil kebijakan pembatasan impor untuk menjaga perekonomiannya. Namun kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kemerosotan perekonomian, dan akhirnya banyak negara yang tidak mampu lagi bertahan.

Karena masalah ini, perwakilan banyak negara datang ke Konferensi Bretton Woods dan membahas syarat-syarat perjanjian. Tujuannya adalah untuk memantau sistem moneter internasional, nilai tukar dan untuk

¹⁰ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, Istiqom Shinta Hardiyanti, and Afri Suhairi Panjaitan, "MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH: DASAR HUKUM, TAHAPAN DAN URGENSINYA," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 1 (2023): 22–38.

¹¹ Al-Fadhat and Savitri, "Lembaga Keuangan Internasional Dan Persoalan Sustainable Development Goals."

¹² Hanif Nur Widhiyanti et al., *Hukum Ekonomi Internasional* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

memastikan bahwa pembatasan nilai tukar dihilangkan.¹³ Akhirnya pada bulan Desember 1, tepatnya tahun 1945, sebuah organisasi internasional yang kini dikenal dengan nama IMF resmi berdiri. Saat itu, terdapat 29 negara yang menjadi anggota dan penandatanganan perjanjian tersebut.

Kebijakan Jangka Panjang IMF

Awalnya, strategi pembangunan ekonomi IMF, yang dikenal sebagai ortodoksi, menekankan pengembangan sektor swasta untuk mendorong efisiensi pasar.¹⁴ Namun, strategi ini dikritik oleh para ekonom di luar IMF karena penekanannya yang kuat pada praktik pasar. Kemudian Dana Moneter Internasional mulai fokus pada faktor-faktor non-pasar lainnya: langkah-langkah untuk mengurangi inflasi dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi permintaan, mengendalikan harga, memperbaiki lingkungan politik atau membangun demokrasi, mengurangi atau menghilangkan subsidi pemerintah, dan menunda inflasi. Gaji PNS dipastikan akan dinaikkan tanpa mempengaruhi APBN. Metode ini disebut metode heterodoks. Teori hiperstabilitas mensyaratkan bahwa sistem moneter internasional yang stabil dapat dibangun hanya jika anggota sistem menghormati kebebasan ekonomi. Suatu negara dianggap sebagai anggota sistem yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari layanan Dana Moneter Internasional jika negara tersebut menggunakan standar sukarela.

Menanggapi krisis mata uang Indonesia, strategi awal IMF untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mendorong pemerintah Indonesia melakukan transisi dari ekonomi pasar yang dipaksakan ke sistem keuangan yang lebih terorganisir.¹⁵ Meskipun Indonesia merupakan negara penandatanganan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), IMF menilai Indonesia belum menerapkan prinsip ekonomi pasar secara konsisten. Inkonsistensi ini terlihat pada berbagai rezim perekonomian yang menyimpang dari prinsip pasar.

Untuk mengatasi krisis mata uang Indonesia, langkah pertama IMF adalah mendesak pemerintah Indonesia untuk beralih dari ekonomi pasar yang dipaksakan menuju sistem keuangan yang lebih teratur. Menurut IMF, meskipun Indonesia merupakan negara penandatanganan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia belum secara konsisten menerapkan prinsip ekonomi pasar.¹⁶ Keadaan ini ditandai dengan berbagai rezim perekonomian yang menyimpang dari prinsip pasar. Oleh karena itu, perjanjian yang ditandatangani antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus memuat perubahan sistem ekonomi pasar yang diinginkan IMF.

¹³ Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "Kiprah Dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global: Faktor Pendukung, Penghambat Dan Peluang Yang Dimiliki," *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022): 234–250.

¹⁴ Muhammad Ridwan et al., "Perluakah Posisi Internasional Monetary Fund (IMF) Mendukung Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang?," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 13, no. 1 (2025): 33–45.

¹⁵ Muhammad Hamdan Ali Masduqie and Ridwan Chesae, "Application of Mudharabah Agreement Regulation through the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in Islamic Banking in Indonesia," *Asean Journal of Halal Industry* 1, no. 2 (2024): 30–38.

¹⁶ Yudhistira Ardana and Nur Syamsiyah, *Perekonomian Indonesia* (Penerbit NEM, 2023).

Salah satu kebijakan penting yang diatur adalah subsidi bahan bakar, yang memerlukan intervensi pemerintah untuk menetapkan harga bahan bakar lokal di bawah harga pasar. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat antara tahun 1990 dan 1993, dengan pertumbuhan PDB sebesar 3,1 persen per tahun antara tahun 1988 dan 1994, dan inflasi menurun dari 145 persen menjadi 6 persen. Namun, sebagian besar aliran masuk modal asing ke wilayah ini disebabkan oleh campur tangan satu orang saja.

Kebijakan IMF Jangka Pendek

Pinjaman yang dirancang untuk mengatasi masalah pembayaran jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu pendek, yaitu antara 12 hingga 18 bulan, dengan jangka waktu maksimum yang disetujui adalah 3 tahun. Jangka waktu pinjaman ini bervariasi antara 2 tahun 3 bulan hingga 4 tahun, atau 3 tahun 3 bulan hingga 5 tahun. Biaya yang harus dibayarkan mencakup pokok pinjaman ditambah tambahan pokok sebesar 100 untuk jumlah di atas 200% kuota, dan 300 basis pada 200% kuota. Syarat yang harus dipenuhi adalah anggota harus menyetujui dan menerapkan kebijakan yang menjamin gaji dibayarkan tepat waktu.

Dana tambahan ini memberikan bantuan sementara kepada anggota untuk mencegah masalah pembayaran akibat hilangnya kepercayaan pasar secara tiba-tiba, dan hanya tersedia sebagai pelengkap bagi lembaga reguler. Fasilitas ini tidak terbatas, hanya tersedia jika menerima dana atau konsolidasi dari perusahaan biasa, yang dapat bertahan lebih dari satu tahun. Jangka waktu pelunasan berkisar antara 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan, atau 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun.

Kebijakan IMF Jangka Menengah

Bantuan darurat terdiri dari dua jenis. Pertama, bantuan bencana, di mana IMF memberikan bantuan segera dan jangka pendek kepada negara anggota untuk mengatasi masalah pembayaran yang timbul akibat bencana. Kedua, bantuan pasca-konflik, di mana IMF memberikan bantuan darurat jangka menengah untuk menangani krisis upah yang terjadi setelah kerusuhan sipil atau konflik bersenjata lintas batas. Jumlah maksimum bantuan ini adalah 25% dari kuota, namun jumlah yang lebih tinggi dapat diberikan dalam kasus luar biasa. Jangka waktu pelunasan berkisar antara 3 tahun 3 bulan hingga 5 tahun. Dana ini ditawarkan berdasarkan jumlah pokok tanpa biaya tambahan, dan bantuan subsidi dapat diberikan kepada negara berpendapatan rendah jika sumber daya tersedia.

Tujuan International Monetary Fund (IMF)

Meskipun tujuan Piagam IMF telah mengalami perubahan seiring waktu, tujuannya tetap sama seperti saat pertama kali ditetapkan pada tahun 1944:

1. Meningkatkan kerja sama moneter internasional melalui lembaga permanen yang mengelola konsultasi dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah moneter internasional.
2. Memfasilitasi perluasan dan perkembangan perdagangan internasional, yang berkontribusi pada peningkatan dan pemeliharaan tingkat lapangan kerja yang tinggi, pendapatan riil, serta pengembangan sumber daya produktif anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.
3. Meningkatkan dan menjaga stabilitas nilai tukar antar anggota, serta mencegah devaluasi nilai tukar.

4. Memfasilitasi pembentukan sistem pembayaran bilateral untuk perdagangan antar anggota dan menghapus pembatasan devisa yang menghambat perkembangan perdagangan dunia.
5. Memberikan dukungan kepada anggota dengan menyediakan pinjaman, sehingga memungkinkan mereka memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem pembayaran tanpa menghambat pembangunan nasional dan internasional.
6. Memperpendek jangka waktu dan mengurangi ketidakseimbangan sistem pembayaran internasional anggota melalui upaya tersebut.

Negara-negara anggota IMF berkomitmen untuk mengelola nilai tukar dan kebijakan ekonomi demi mendorong stabilitas keuangan internasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IMF, yang terdiri dari 190 negara, bertujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional di bidang moneter, meningkatkan stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan global. IMF menggunakan dana ini untuk membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah keuangan sesuai dengan sistem keuangan internasional, menjamin keamanan, dan menjaga keseimbangan global serta lokal.

Pendanaan negara-negara anggota IMF berasal dari kontribusi keanggotaan atau tinjauan tambahan berkala saat mereka bergabung dengan IMF. Negara menyeter 25% modal saham dalam bentuk retribusi khusus atau modal saham, sementara 75% lainnya dapat dicairkan oleh IMF dalam mata uang negara-negara anggota sesuai kebutuhan mereka. Besaran kontribusi suatu negara menentukan hak suara dan akses pinjaman dari IMF.

Krisis keuangan memberikan peluang bagi negara berkembang untuk melakukan perubahan kebijakan yang radikal, tetapi seringkali mengakibatkan perubahan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara maju. Skala kontribusi mencerminkan ukuran relatif ekonomi global suatu negara: semakin besar output ekonomi dan diversifikasi perdagangan, semakin besar kontribusinya. Amerika Serikat, sebagai ekonomi terbesar dunia, adalah kontributor terbesar IMF dengan 17,26% dari total dana. Sebaliknya, negara-negara anggota lainnya berkontribusi dalam jumlah kecil, bahkan hingga hanya 0,001%. Kuota ini ditinjau secara berkala.

Setiap anggota dapat meminjam lebih dari 25% kuota tahunan dengan maksimum 125% selama lima tahun. IMF memiliki badan penting seperti Dewan Eksekutif, Dewan Gubernur, dan Direktur Eksekutif. Setiap negara memiliki kursi di dewan ini. Dewan direksi, yang terdiri dari 24 pejabat senior, bertanggung jawab atas pekerjaan IMF, dengan semua wewenang berada di tangan Dewan Pengurus. Dewan direksi mengendalikan aset dan operasi IMF.

Asosiasi Gubernur dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada Ketua Eksekutif. Wewenang yang didelegasikan adalah milik Ketua Dewan Eksekutif:

1. Kekuasaan untuk menerima, menanggukuhkan atau menolak keanggotaan dan menyetujui perubahan biaya.
2. Kekuasaan untuk mengizinkan perubahan nilai mata uang suatu negara anggota secara simultan atau kekuasaan untuk mendistribusikan pendapatan di antara IMF.

3. Wewenang untuk menentukan penghentian kerja negara-negara anggota IMF.

Peran IMF adalah menyediakan dana darurat melalui IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya, menggunakan IMF sebagai referensi. Metode pemberian pinjaman dan kebijakan IMF dijelaskan sebagai berikut:

1. Pinjaman untuk Masalah Neraca Pembayaran Jangka Pendek: Pinjaman ini memiliki durasi antara 12 hingga 18 bulan, dengan maksimum 3 tahun. Jumlah pinjaman maksimal 100% dari kuota tahunan dan total penggunaan dana IMF sebesar 300%. Jangka waktu pinjaman berkisar antara 2 tahun 3 bulan hingga 4 tahun, dan 3 tahun 3 bulan hingga 5 tahun. Komisi awal dibayarkan, dengan premi sebesar 100 untuk jumlah di atas 200% kuota, dan 300 untuk jumlah di atas 300%. Semua anggota harus menyetujui dan mengikuti instruksi agar masalah pembayaran dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Dukungan Jangka Panjang untuk Perubahan Struktural: Dana ini mendukung perubahan struktural untuk mengatasi masalah upah jangka panjang. Jumlah pinjaman tahunan adalah 100% dari kuota, dengan total 300% dari aset IMF. Durasi pinjaman adalah antara 4 tahun 6 bulan hingga 7 tahun, atau 4 tahun 6 bulan hingga 10 tahun. Premi tambahan sebesar
3. 100 poin untuk tarif 200%, dan 200 poin untuk tarif 300% dikenakan. Anggota harus menyetujui dan melaksanakan rencana strategis tiga tahun serta memberikan informasi strategis tahunan selama dua belas bulan ke depan.
4. Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan: Instrumen ini memberikan dukungan jangka panjang untuk mengatasi masalah struktural terkait pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Ambang batas dukungan adalah 140% dari kuota, dengan maksimum 185%. Durasi pinjaman antara 5 hingga 12 tahun, dengan bunga antara 0,5% hingga 1% per tahun tanpa biaya tambahan. Persyaratan didasarkan pada dokumen kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun oleh negara peserta untuk mengoordinasikan pengentasan kemiskinan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
5. Fasilitas Tambahan: Fasilitas ini tersedia jika akses atau pengumpulan sumber daya untuk aktivitas bisnis normal dapat dilakukan selama lebih dari satu tahun. Jangka waktu penyusutan adalah antara 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan, atau 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun.
6. Diskon 45% untuk Produk Ekspor dan Pasokan Impor Jangka Pendek: Dana ini dialokasikan 45% untuk produk ekspor dan 55% untuk semua item termasuk dua kategori di atas. Durasi pinjaman antara 2 hingga 4 tahun, atau 3 hingga 5 tahun. Tidak ada biaya tambahan karena ini adalah pembayaran pokok saja. Anggota harus menyeimbangkan neraca pembayaran meskipun ada defisit ekspor atau surplus impor.
7. Bantuan Darurat: Terdapat dua jenis bantuan darurat. Pertama, bantuan segera dan jangka menengah untuk menyelesaikan masalah pembayaran akibat bencana seperti banjir atau gempa bumi. Kedua, bantuan untuk menyelesaikan masalah pembayaran akibat kerusuhan dan konflik sosial. Jumlah bantuan adalah 25% dari kuota, namun jumlah yang lebih tinggi mungkin tersedia dalam kasus luar biasa. Gaji pokok diberikan tanpa

tunjangan tambahan.

Peran IMF Dalam Menangani krisis Uang Di Negara Indonesia

Menurut IMF, krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh permintaan dukungan pemerintah kepada IMF setelah nilai tukar rupiah mengalami penurunan signifikan. Rencana pemulihan ekonomi IMF bertujuan untuk memulihkan kepercayaan terhadap mata uang, dengan reformasi sektor keuangan sebagai inti dari setiap rencana pemulihan ekonomi (Fischer 1998b).

Pemerintah Indonesia memperbarui perjanjiannya dengan IMF sebanyak enam kali: Perjanjian Tambahan Kedua mengenai Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MEFP) pada 24 Juni, keempat pada 29 Juli 1998, dan terakhir pada 16 Maret 1999.

Program bantuan pertama IMF ditandatangani pada 31 Oktober 1997 dan mencakup empat elemen:

1. Restrukturisasi sektor keuangan,
2. Kebijakan anggaran,
3. Kebijakan moneter,
4. Reformasi struktural.

Untuk mendukung program ini, IMF akan memberikan pinjaman sebesar \$11,3 miliar untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun. Dari jumlah ini, \$3,04 miliar akan tersedia setelah 15 Maret 1998 jika skema yang disepakati dilaksanakan, sementara sisanya akan dibayar secara bertahap. Dari total pinjaman tersebut, Indonesia memiliki maksimum \$2,07 miliar yang dapat digunakan dari IMF (IMF, 1997: 1). Selain dukungan dari IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara-negara sahabat juga menjanjikan hibah sebesar \$37 miliar (menurut Hartcher dan Ryan), meskipun dukungan ini terkait dengan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program yang diwajibkan oleh IMF. Sebagai perbandingan, Korea menerima bantuan sebesar \$57 miliar selama tiga tahun; \$21 miliar di antaranya berasal dari IMF. Thailand menerima bantuan sebesar \$17,2 miliar, dengan \$4 miliar dari IMF dan \$0,5 miliar dari Indonesia dan Korea.

Karena proyek-proyek yang diusulkan IMF sering dianggap memberatkan dan sulit dilaksanakan oleh pihak Indonesia, negosiasi lanjutan dilakukan pada 15 Januari yang menghasilkan kesepakatan mengenai reformasi ekonomi (surat penyelidikan); Pada tahun 1998, kesepakatan ini terdiri dari 50 poin. Diharapkan rekomendasi IMF dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin stabilitas nilai tukar rupiah (Pasal 17 Perjanjian IMF tanggal 15 Januari 1998). Manajer program IMF adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan makroekonomi: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan nilai tukar.
- b. Reformasi sektor keuangan: program reformasi perbankan, penguatan regulasi dan pengawasan perbankan.
- c. Reformasi struktural: perdagangan dan investasi, desentralisasi dan privatisasi, jaminan sosial, dan lingkungan.

Setelah berbagai kendala dalam pelaksanaan amandemen kedua, perundingan dilakukan pada 10 April 1998 yang berujung pada penandatanganan perjanjian tambahan yang terdiri dari 20 pasal, 7 lampiran, dan satu matriks.

Isi perjanjian ini lebih luas dibandingkan dua perjanjian sebelumnya, dan pasal baru mencakup penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Rencana implementasi dicatat dalam matriks kebijakan per program. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah:

1. Stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kekuatan ekonomi Indonesia;
2. Penguatan dan percepatan reformasi sistem perbankan;
3. Penguatan reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang lebih efisien dan efektif;
4. Penyelesaian masalah utang perusahaan swasta;
5. Mengembalikan neraca perdagangan untuk menghidupkan kembali ekspor.

Ketujuh lampiran adalah:

1. Kebijakan moneter dan suku bunga,
2. Perkembangan sektor perbankan,
3. Dukungan APBN untuk kelompok masyarakat kurang mampu,
4. Reformasi dan privatisasi BUMN,
5. Reformasi kelembagaan,
6. Pembaruan utang swasta,
7. Hukum kebangkrutan dan reformasi hukum.

Bagian terpenting dari program IMF adalah restrukturisasi sektor perbankan. Pemerintah akan terus menjamin pinjaman yang menguntungkan bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tambahan dana dari APBN (Pasal 16 dan 20 Lampiran). Pinjaman lain sebesar \$989,4 juta telah disetujui pada awal Mei 1998 dan akan dicairkan pada awal Juni dan awal Juli, kecuali jika pemerintah melaksanakan rencana IMF. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/CEO von Bappenas menekankan bahwa dana dari IMF dan lainnya digunakan untuk mendukung upah rata-rata dan memastikan stabilitas, keamanan, dan kepercayaan pada perekonomian, serta untuk memenuhi komitmen pertama (Kompas, 6 Mei 1998). Dana tambahan akan jatuh tempo pada awal Juni dan tidak akan tersedia hingga awal September.

Peran IMF Dalam Menangani krisis Uang Di Negara Sri Lanka

Peran IMF dalam program pemulihan ekonomi Sri Lanka adalah memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Perjanjian Dana Moneter Internasional. Amandemen yang diadopsi pada bulan Juni 1968 memungkinkan IMF memberikan hak penarikan khusus kepada negara-negara anggota untuk membantu mereka memecahkan masalah upah. Mendukung mandat IMF lainnya untuk memandu pemulihan negara. Dalam proses penerimaan bantuan, Sri Lankasebagai sebuah negara perlu menerapkan berbagai langkah kebijakan sesuai dengan pedoman IMF. Kebijakan ini memerlukan waktu hampir satu tahun untuk diterapkan; Hal ini membuat peran IMF dalam memberikan bantuan dipertanyakan mengingat krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka saat ini. Meskipun IMF saat ini menyetujui penyaluran dana, Sri Lanka memerlukan waktu satu tahun untuk menerima persetujuan ini. Bantuan tersebut akan diberikan secara formal setelah Sri Lanka menandatangani Nota Kesepahaman IMF No. dan IMF juga akan terlibat dalam meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Sri Lanka, sehingga Sri Lanka juga akan menerima bantuan dari Bank Dunia dan bantuan lainnya dari kedua negara. akan mengambil.

Peran IMF Dalam Menangani krisis Uang Di Negara Ukraina

Peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam memerangi krisis keuangan di Ukraina sangat penting, terutama dalam konteks permasalahan akibat agresi Rusia. Penjelasan langkah-langkah yang dilakukan IMF adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan darurat dan stabilitas makroekonomi: Pada tahun 2022, IMF menyediakan pembiayaan darurat sebesar \$2,7 miliar melalui Rapid Response Facility (RFI). Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendukung krisis ekonomi dan menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan selama periode IMF.
2. Program Pemantauan dan Pengelolaan (PMB): Hingga akhir tahun 2022, IMF telah menyetujui program PMB yang berdurasi empat bulan. Program ini memungkinkan IMF untuk memantau secara dekat kinerja perekonomian Ukraina dan menjadi dasar program pembiayaan jangka panjang IMF.
3. Dana yang Diperluas (EFF): Pada bulan Maret 2023, IMF menyetujui pendanaan sebesar \$15,6 miliar melalui EFF. Ini adalah program internasional senilai \$115 miliar selama empat tahun, yang bertujuan untuk mendukung kebijakan stabilisasi ekonomi Ukraina, mempercepat pembangunan dan membangun kembali negara tersebut setelah konflik IMF
4. Konsolidasi Reformasi Ekonomi: IMF juga berperan dalam membantu Ukraina merencanakan dan melaksanakan reformasi ekonomi yang komprehensif. Hal ini mencakup reformasi fiskal untuk mengurangi defisit anggaran yang disebabkan oleh proteksionisme dan ketidakpastian, serta langkah-langkah untuk memperkuat kerangka kebijakan moneter dan fiskal (Dewan Luar Negeri).
5. Peningkatan kapasitas dan dukungan teknis: Selain bantuan keuangan, IMF memberikan dukungan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga Ukraina dalam mengelola perekonomian mereka pada saat krisis. Hal ini termasuk bantuan penganggaran, pengelolaan utang dan kebijakan ekonomi lainnya (Dewan Luar Negeri). Bantuan IMF kepada Ukraina merupakan bagian dari upaya internasional yang bertujuan untuk mendukung perekonomian dan pertumbuhan negara tersebut selama konflik yang sedang berlangsung. Pendekatan multi-fase IMF menggarisbawahi perlunya perubahan dan adaptasi di masa-masa sulit dan penuh tantangan. negara yang tercantum di atas adalah contoh negara-negara yang telah dibantu oleh IMF dalam memerangi krisis ekonomi.

E. KESIMPULAN

International Monetary Fund (IMF) memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing negara. Di Indonesia, IMF berfokus pada reformasi sektor keuangan dan pengendalian inflasi untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Di Sri Lanka, peran IMF terlihat dalam membantu penyeimbangan pembayaran serta mendukung reformasi kebijakan ekonomi guna memitigasi krisis fiskal. Sementara itu, di Ukraina, IMF memberikan pembiayaan darurat, reformasi keuangan, dan bantuan teknis, terutama dalam konteks isu-isu yang muncul

akibat konflik.

Dalam setiap kasus, IMF tidak hanya menyediakan bantuan keuangan, tetapi juga berkontribusi melalui dukungan teknis dan dorongan untuk reformasi struktural. Hal ini menunjukkan bahwa peran IMF melampaui fungsi pemberian pinjaman, melibatkan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan komprehensif untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Peran IMF dalam memfasilitasi kerja sama internasional dan memperkuat kebijakan ekonomi global menjadi bukti pentingnya sinergi antara negara berkembang dan lembaga internasional dalam mengatasi krisis ekonomi. Dengan demikian, keberadaan IMF tetap relevan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadhat, Faris, and Jasmine Savitri. "Lembaga Keuangan Internasional Dan Persoalan Sustainable Development Goals." *Yogyakarta: Samudra Biru* (2023).
- Ardana, Yudhistira, and Nur Syamsiyah. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit NEM, 2023.
- Harun, Umar. "Perspektif Politik Internasional Penerapan Strategi Bantuan Imf Terhadap Indonesia." Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2022.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, Zulkifli Nasution, and Fauziah Lubis. "Implikasi Globalisasi Dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024).
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali. "Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- . "Kiprah Dan Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global: Faktor Pendukung, Penghambat Dan Peluang Yang Dimiliki." *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022): 234–250.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, and Sirajul Arifin. "Socio-Economic Construction: Inorganic Waste Valuation Through the Indonesian Waqf Board (BWI) on Cash Waqf Development." *KnE Social Sciences* 10, no. 14 (2025): 526–538.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, and Ridwan Chesae. "Application of Mudharabah Agreement Regulation through the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in Islamic Banking in Indonesia." *Asean Journal of Halal Industry* 1, no. 2 (2024): 30–38.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, Istiqom Shinta Hardiyanti, and Afri Suhairi Panjaitan. "MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH: DASAR HUKUM, TAHAPAN DAN URGENSINYA." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 1 (2023): 22–38.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, Syarifudin Syarifudin, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "Green Economy of Waste Bank in the Perspective of Maqashid Sharia in Surabaya-Green Economy Melalui Bank Sampahdalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)* 8, no. 5 (2021): 593–606.
- Meutia, Intan Fitri. "Reformasi Administrasi Publik." AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Ridwan, Muhammad, Dies Nurhayati, Yulia Nor Frassiska, and Ninik Sudarwati. "Perlukah Posisi Internasional Monetary Fund (IMF) Mendukung Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang?" *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 13, no. 1 (2025): 33–45.
- Sahban, Muhammad Amsal, and M M Se. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.
- Saragih, Andika Amrija. "Bretton Woods System: Eksistensi Hegemon Amerika Serikat Dalam Tatanan Perekonomian Global Paska Perang Dunia." *Global and Policy Journal of International Relations* 4, no. 02 (2016).
- Widhiyanti, Hanif Nur, Rika Kurniaty, Patricia Audrey, Hikmatul Ula, and A A A Nanda Saraswati. *Hukum Ekonomi Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2020.